

NALAR POLITIK KEWILAYAAN KESULTANAN TIDORE: STUDI TRANSMIGRASI LOKAL DAN MAKNA REALITAS SOSIAL ORANG TIDORE DI HALMAHERA

Bustamin Wahid^{1*}, Uswatul Mardiyah², La Basri³, Siti Nurul Nikmatul Ula⁴

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: bustaminwahid0@gmail.com

Citation (APA):

Wahid, B., Mardiyah, U., Basri, L., & Ula, S. N. N. (2026). Nalar Politik Kewilayaan Kesultanan Tidore: Studi Transmigrasi Lokal dan Makna Realitas Sosial Orang Tidore di Halmahera. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 141–159. <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5732>

Email Authors:

bustaminwahid0@gmail.com
uswatul.mardiyah@gmail.com
basri90@gmail.com
sn396396@gmail.com

Submitted: 18 Mei, 2026

Accepted: 07 Juni, 2026

Published: 26 Juni, 2026

Copyright © 2026 Bustamin Wahid, Uswatul Mardiyah, La Basri, Siti Nurul Nikmatul Ula

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengulas dan mengurai nalar politik kesultanan Tidore dalam kebijakan transmigrasi lokal dan membaca realitas sosial baru orang Tidore di Halmahera yang memiliki resiliensi terhadap perubahan sosial politik dalam perspektif modal sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen, kemudian data dianalisis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan penelitian ini mengurai fenomena yang menarik. Pertama, nalar politik Kesultanan Tidore berfokus pada argumentasi Sultan Zainal Abidin. Ada empat argumentasi penting kesultanan dalam program transmigrasi: (a) mobilisasi kekuatan Islam dari Tidore ke dataran Halmahera (islamisasi); (b) pencegahan kristenisasi dari suku Sangir dan Tobelo-Galela ke wilayah Oba Utara; (c) antisipasi transmigrasi pendudukan dari Pulau Jawa ke luar Jawa; (d) transmigrasi lokal ke Halmahera adalah bagian daripada strategi politik keamanan dan pertahanan menjelang perebutan Irian Barat. Kedua, realitas sosial baru orang Tidore di Halmahera telah menghidupkan modalitas sosial, marong, galasi, galoli dalam menemukan makna sosial baru di Halmahera. Mekanisme ditopang dalam kepatuhan sosial dan budaya spritualitas masyarakat.

Kata kunci: Nala Politik; Kesultanan Tidore; Transmigrasi Lokal; Realitas Sosial Baru; Orang Tidore di Halmahera.

ABSTRACT

This article aims to examine and analyse the political reasoning of the Tidore Sultanate regarding local transmigration policies and to explore the new social reality of the Tidore people in Halmahera, who have demonstrated resilience in the face of socio-political change, from the perspective of social capital. The methodology employed is qualitative descriptive, utilising a historical approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, and subsequently analysed according to predefined criteria. The findings of this study reveal some interesting phenomena. Firstly, the political rationale of the Tidore Sultanate centred on the arguments put forward by Sultan Zainal Abidin. There were four key arguments put forward by the sultanate regarding the transmigration programme: (a) the mobilisation of Islamic forces from Tidore to the Halmahera lowlands (Islamisation); (b) the prevention of Christianisation among the Sangir and Tobelo-Galela tribes in the North Oba region; (c) anticipation of settlement migration from Java to areas outside Java; (d) local migration to Halmahera as part of a political security and defence strategy in the run-up to the struggle for West Irian. Secondly, the new social reality of the Tidore people in Halmahera has revitalised social modalities—marong, galasi and galoli—in search of new social meaning. These mechanisms are underpinned by the community's social compliance and cultural spirituality.

Keywords: Political Nala; Tidore Sultanate; Local Transmigration; New Social Realities; Tidore People in Halmahera

PENDAHULUAN

Fenomena kebijakan tranmigrasi lokal yang dilakukan kesultanan Tidore, tidak terlepas dari nalar politik nasional pascakemerdekaan Indonesia. Beberapa rujukan sejarah politik kewilayaan salah satu aspek

yang dasari pada deskripsi sejarah perubahan ruang hidup manusia, maka salah satu solusi yang di ambil adalah membentuk realitas soisal baru dengan proses pemindahan penduduk. Pada 1905 pemerintahan Hindia Belanda memiliki rencana untuk memindahkan penduduk Jawa ke luar pulau Jawa. Pulau seperti Sumatra dan Kalimantan adalah dengan tujuan kerja rodi dan *culture stelsel*. Pemerintah Hinda Belanda mengklaim bahwa gelombang kemiskinan akan terjadi di pulau Jawa. Selain itu juga transmigasi militer juga dikhususkan pada daerah-daerah perbatasan seperti Irian jaya, Timur Timur untuk kepentingan pertahanan dan keamanan (Fearnside, 1997).

Manay (2016) menjelaskan bahwa pemerintah mulai menyusun rencana pemindahan penduduk dalam skala besar sejak akhir 1950 dan melaksanakannya secara efektif pada tahun berikutnya. Pemerintah mendirikan Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) pada 10 Februari 1951 untuk menangani pemindahan mantan pejuang yang tidak tertampung dalam angkatan bersenjata. Selanjutnya, pemerintah membentuk *Corps Tjadangan Nasional* (CTN) pada 28 Maret 1951 untuk mengurus anggota dan mantan anggota angkatan perang. Dengan demikian, program transmigrasi pada periode tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemerataan penduduk, tetapi juga mengandung kepentingan ekonomi, politik, keamanan, dan integrasi nasional (Manay, 2016).

Gagasan tersebut dapat dikaitkan dengan teori kependudukan Malthus. Malthus (2023) berpendapat bahwa apabila tidak dikendalikan, penduduk cenderung bertambah menurut deret ukur, sedangkan kemampuan penyediaan bahan pangan bertambah menurut deret hitung. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan kelangkaan pangan, kemiskinan, dan tekanan terhadap sumber daya. Meskipun perkembangan teknologi pertanian membuat prediksi Malthus tidak sepenuhnya berlaku secara universal, teorinya tetap relevan sebagai landasan historis untuk menjelaskan kekhawatiran terhadap ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya.

Makna proses pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke daerah luar Jawa adalah menghindari pemadatan penduduk dan konflik perebutana ruang hidup, tentu itu sangar berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Mencermati laporan dari Pemerinahan Kolonial Belanda ledakan penduduk di pulau jawa terus meningkat, sedangkan kita berkelindan dengan pendapatan masyarakat dan kuantitas sawah tidak menunjukkan tren peningkatan yang linear dengan bertambahnya penduduk. Transmigrasi orang Jawa ke Halmahera memperkuat relasi sosial dan berdampak (budaya pertanian). Prinsip "*sapa sing gawe nganggo, sapa sing nandur ngunduh*" yang bermakna siapa yang membuat dialah yang memakai dan siapa yang menanam dia memetikinya (Basuki et al., 2025). Prinsip tersebut mendorong mereka untuk terus bekerja keras dan tekun mengolah lahan. Mereka mengembangkan strategi adaptasi dengan menanam padi gogo, palawija, dan umbi-umbian, mengubah lahan kering menjadi sawah, serta menggunakan pengetahuan tradisional *pranata mangsa* sebagai pedoman menentukan waktu tanam. Sementara itu, (Muksin et al., 2022) menunjukkan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi juga sangat bergantung pada kepastian penyediaan lahan, status hukum tanah, kapasitas pemerintah, dan penerimaan masyarakat setempat. Dalam kasus transmigrasi lokal, penyediaan lahan secara cuma-cuma menjadi bagian penting dari kebijakan pengembangan transmigrasi. Oleh sebab itu, transmigrasi tidak cukup dipahami sebagai pemindahan penduduk, tetapi harus ditempatkan sebagai kebijakan pengembangan wilayah yang membutuhkan kepastian agraria dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Kesultanan Tidore melalui Sultan Zinal Abdin Syah dalam kebijakan dan titah kesultanan tentang pemindahan pendudukan Tidore ke daerah Halmahera. Kebijakan Politik kewilayahan ini memiliki beberapa alasan yang sangat mendasar yakni: *Pertama*, mobilisasi orang Islam yang ada di Tidore ke Halmahera (keawatiran kristenisasi dataran Halmahera). *Kedua*, alasan dari kesultanan Tidore ingin membangun pembangunan wilayah dan kepemilikan tanah masyarakat Tidore. *Ketiga*, pasca transisi kepemimpinan dari Soekarno ke Presiden Soeharto, ada wacana tentang transmigrasi besar-besaran pendudukan di pulau Jawa ke seluruh daerah yang ada di Indonesia (Laporan Sejarah Kawasan Dinasa Pariwisata, 2013).

Selain argumentasi yang mendasar dari kesultanan di Tidore tersebut di atas bukan sikap penolakan atas rencana transmigrasi di Halmahera/wilayah Kesultanan Tidore. Tapi kesultanan merespon program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut dengan langkah membuat kebijakan transmigrasi lokal. Sebagaimana sudah disebutkan di awal ada dua nalar politik kesultanan dalam mendorong program transmigrasi yakni distribusi Islam Tidore ke dataran Halmahera (islamisasi Halmahera) dan distribusi penduduk Tidore ke Halmahera dalam rangka kepentingan politik pertahanan Nasional. Politik kewilayahan dalam konteks kebijakan transmigrasi berlandaskan pada alasan pemerintah, baik pusat maupun daerah, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program transmigrasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek kewilayahan, seperti potensi sumber daya, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Transmigrasi, yang awalnya difokuskan pada pemindahan penduduk, kini lebih luas, mencakup pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi lokal.

Transmigrasi lokal Kesultanan Tidore harus diisi oleh sumber daya manusia atau orang-orang yang ada di Kesultanan itu sendiri. Alasan politik kewilayahan itu menjadi sangat penting karena pasca integrasi Papua ke NKRI upaya program Pemerintrah Pusat adalah mendistribusi secara besar-besaran penduduk di tanah Jawa untuk mendiami kepulauan Papua dan Halmahera dalam dokumen Soeharto, 1994 Transmigrasi di Indonesia (Yuminarti, 2017)

Kebijakan transmigrasi yang diterapkan oleh Sultan Tidore (Zainal Abdin Syah) pasca integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bagian penting dari dinamika sejarah pembangunan sosial ekonomi di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Halmahera (Fatgehipon & Utomo, 2020). Umumnya alasan Trasmigrasi pada dasarnya adalah suatu kebijakan pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduk dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan demografis, meningkatkan pemerataan pembangunan serta membuka kesempatan dalam sektor pertanian ekonomi (Nurlinah & Haryanto, 2024).

Sultan Tidore sebagai pemimpin lokal memainkan peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan trasmigrasi di wilayah Halmahera, kebijakan ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah kepadatan penduduk di daerah tertentu sekaligus mengembangkan kawasan yang lebih kurang terjangkau oleh infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini Sultan Tidore tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kepentingan lokal, tetapi juga sebagai pengelola startegi pembangunan yang bersifat inklusif, distribusi penduduk ke Halmahera bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi di daerah tersebut, serta membuka akses terhadap pasar-pasar baru. Di samping itu trasmigrasi juga dilihat sebagai cara untuk mempercepat proses integrasi di wilayah Indonesia Timur ke struktur sosial-politik NKRI.

Relevansi kebijakan transmigrasi Sultan Tidore ini dapat dilihat dalam konteks pembangunan regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan ditenga upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan di luar Jawa, pengalaman trasmigrasi ini dapat menjadi referensi untuk kebijakan serupa di masa depan. Disisi lain tantangan yang muncul dalam kebijakan ini seperti pengelolaan konflik sosial, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal, tetap relevan dalam konteks pembangunan masyarakat lokal. Terpenting dari kebijakan transmigrasi kesultanan adalah bagian dari pada strategi politik yang berbicara pada dampak ketahanan nasional dan visi tauhid sosial kesultanan Tidore.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan perspektif sejarah. Pendekatan tersebut dipilih untuk menguraikan secara mendalam nalar politik Kesultanan Tidore dalam penyelenggaraan transmigrasi lokal di Halmahera setelah Agresi Militer Belanda II. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menyajikan pengalaman, pandangan, dan pemaknaan masyarakat berdasarkan konteks sosialnya tanpa melepaskan kompleksitas fenomena yang diteliti (Busetto et al., 2020; Sukmana et al., 2020). Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, keterlibatan, dan kemampuannya menjelaskan sejarah sosial masyarakat transmigrasi setempat. Informan dapat meliputi tokoh adat, perangkat kesultanan, keturunan pelaku transmigrasi, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan penelitian. Teknik purposif sesuai ketika penelitian membutuhkan informan yang menguasai informasi khusus dan relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Studi dokumen mencakup arsip kesultanan, laporan pemerintah, peraturan, catatan keluarga, foto, peta, serta literatur akademik yang relevan. Peneliti kemudian melakukan triangulasi dengan membandingkan kesaksian lisan dengan sumber tertulis dan kondisi empiris di lapangan. Triangulasi ini penting karena ingatan informan mengenai masa lalu dapat dipengaruhi pengalaman pribadi, posisi sosial, identitas kelompok, dan perkembangan keadaan setelah peristiwa berlangsung (Leitner, 2024).

Peneliti menganalisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014), yang mencakup tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis berlangsung sejak pengumpulan data dimulai. Peneliti menyeleksi informasi yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema, membandingkan keterangan antar-informan dan dokumen, kemudian menyusun hubungan antara peristiwa sejarah dengan dampak sosialnya pada masyarakat transmigrasi masa kini. Keterlibatan peneliti sejak masa studi sarjana pada 2009 sampai pendalaman penelitian hingga 2025 diposisikan sebagai *prolonged engagement*. Keterlibatan tersebut membantu peneliti memahami konteks sosial, mengenali aktor, dan mengikuti perubahan masyarakat dalam jangka panjang. Meskipun demikian, pengalaman pribadi tidak secara otomatis menjadi bukti penelitian. Peneliti perlu mendokumentasikannya melalui catatan lapangan, memo reflektif, rekaman wawancara, foto, atau dokumen bertanggal. Peneliti juga harus menerapkan reflektivitas dengan menjelaskan bagaimana kedekatan, pengalaman, dan posisi pribadinya dapat memengaruhi pemilihan informan, penafsiran data, dan penyusunan kesimpulan (Olmos-Vega et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Naral Politik Kewilayaan Kesultanan Tidore

Peneliti menemukan dua nalar politik pertahanan wilayahan dan nalar islamisasi sebagai instrumen utama dalam mendorong proses kebijakan transmigrasi lokal di Halmahera oleh Kesultanan Tidore. Karena proses adaptasi Kesultanan Tidore adalah merespon kebijakan politik kependudukan pasca kemerdekaan Indonesia. Swasano & Singarimbun (1985) mengungkapkan bahwa transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru harapannya bisa membantu pembangunan daerah untuk cepat berkembang. Sultan Zainal Abidin punya kepentingan untuk menjaga wilayah Kesultanan Tidore di dataran Halmahera dari gempuran penduduk pendatang yang beragama Kristen, oleh karena itu beberapa pemangku adat diminta untuk membicarakan pemindahan penduduk ke Halmahera. Sultan Zainal Abidin Syah memiliki otoritas ganda yang saling menguatkan karena Kesultanan Tidore yang memiliki wilayah hingga Papua, kemudian dipertegas lagi dengan kewenangan secara politik setelah Presiden Soekarno menetapkan Sultan Zainal Abidin sebagai Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat (Suryo, 2023). Maka kepentingan kebijakan Sultan Zainal Abidin menguntungkan Indonesia, Halmahera adalah gerbang yang memiliki posisi strategis untuk perebutan Irian Barat (Wahid et al., 2021). Berdasarkan keterangan M. Nur dalam penjelasannya bahwa transmigrasi di Halmahera tidak hanya perpindahan penduduk akan tetapi ada tujuan politik dan keamanan. Transmigrasi di Halmahera sebagai cara pemerintah menjaga keamanan dan stabilitas karena Halmahera dekat dengan Papua tentunya dapat membantu negara untuk menguatkan kendali wilayah timur saat pra Integrasi Papua ke NKRI (W/21/11/2025).

Dalam dokumen sejarah Trikora menetapkan dua jalur strategis sebagai ruang penyerangan, antara lain lewat Maluku dan Halmahera (Halmahera Patani, Maba dan Morotai). Pemanfaatan fasilitas militer peninggalan Perang Dunia II untuk agenda Trikora. Oleh karena itu Halmahera dijadikan sebagai arena penumpukan pasukan dan ancaman nyata bagi Belanda di Papua. Jadi koordinasi Kesultanan Tidore dan empat kesultanan di Maluku Utara adalah kekuatan politik regional dan strategi perang dalam perebutan Irian Barat (Suryo, 2023; Wahid et al., 2021). berdasarkan wawancara dengan Lahi Safar menceritakan bahwa perjuangan Irian Barat itu adalah sikap politik luar biasa, selain pemindahan masyarakat adat yang loyal terhadap Sultan Zainal Abidin. selain itu Sultan Juga menggerakkan untuk membangun infrastruktur seperti rumah tinggal, perumahan politik dan sekolah. Gebrakan dan gelombang perkembangan pembangunan itu dijadikan sebagai satu kekuatan sosial, bahwa perubahan besar akan terjadi di dataran Halmahera (W/17/12/2010).

Transmigrasi di Maluku Utara (Desea Ampera, Garajou, Oba, Kusu) tidak hanya dapat dibaca sebagai kebijakan perpindahan penduduk, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial, keagamaan, dan kewilayahan. Dalam konteks Tidore, jaringan Islam dan posisi Kesultanan memiliki peran penting dalam membentuk relasi sosial masyarakat di wilayah Maluku Utara (Handoko & Mansyur, 2018; Rais, 2010). Pada konteks kebijakan transmigrasi, penyediaan lahan dan dukungan masyarakat lokal di wilayah Tidore menunjukkan bahwa program transmigrasi juga berkaitan dengan strategi pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Muksin et al., 2022). Sementara itu, transmigrasi luar Jawa pada masa awal Republik Indonesia dipengaruhi oleh tekanan demografis di Jawa dan diarahkan untuk pemerataan kesejahteraan melalui perpindahan penduduk ke wilayah lain (Manay, 2016). Selain itu dijabarkan pula tugas dari Jawatan Transmigrasi sebagai penyelenggara utama program tersebut yakni:

- 1) Mengumpulkan penduduk di daerah yang padat untuk dipindahkan ke daerah-daerah lain;
- 2) Melakukan pembukaan tanah-tanah kosong dan hutan-hutan yang baik buat pemindahan penduduk (transmigrasi);
- 3) Memindahkan kaum transmigran dari tempat salnya, ke tempat-tempat yang sudah dibuka menurut rencana yang telah disusun;
- 4) Membangun usaha-usaha bagi penghidupan transmigran di tanah transmigrasi;
- 5) Menjamin hidup kaum transmigran menurut batas yang ditentukan, sejak diberangkatkan dari tempat asalnya sampai mereka mendapat hasil penghidupan sendiri di tempat yang baru;
- 6) Memperbaiki keadaan para transmigran yang lama di tanah-tanah transmigrasi (Manay, 2016).

Pandangan kritis seperti Michel Foucault tentang biokekuasaan yang menasar pada mekanisme dau kutup politik yakni anatomi politik tubuh manusia yang berfokus pada pendisiplinan dan optimalisasi subjek individu; dan bio politik populasi yang berkaitan dengan tubuh sepsis dan proses biologi skala besar. Zerilli, (2026) dalam pendekatan ini menilia bahwa proses trasnmigrasi yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore bagian dari pada mobilisasi orang Tidore ke Halmahera dan Politik Tubuh dalam memperkuat benteng kekuatan Islam dan basis strategis untuk perebutan Irian Barat. Ingatan relasi sejarah dihidupan untuk kepentingan kebijakan tranmigrasi melalui jaringan wacana dan materi yang tersebar luas.

Gambar I. Nalar Politik Kesultanan Dalam Kebijakan Transmigrasi Lokal di Halmahera



Sumber: Deskripsi Data Lapangan, 2025

Pendapat dan temuan empirik mendefinisikan bahwa argumentasi utama Sultan Zinal Abdin Syah (Gubernur Perjuangan Irian Barat) mengeluarkan titah kesultanan sekaligus kebijakan politik kewilayaan tentang pemindahan penduduk Tidore ke daerah Halmahera. Berikut ini adalah uraian argumentasi utama yakni: *Pertama*, mobilisasi orang Islam di Tidore ke Halmahera, hal itu dilakukan untuk menjaga arus deras pemindahan penduduk masyarakat Sangir dan Togale yang ada di Halmahera Utara yang bergerak masuk ke wilayah kesultanan Tidore di dataran Oba Halmahera. Karena alasan mayoritas suku Togale-Sangir beragama Kristen, kesultanan Tidore melihat fenomena pemindahan penduduk tersebut sebagai bentuk dari ancaman keristenisasi di wilaya kesultanan untuk menghidadari polarisasi sosial dan dinamika sosial-agama yang memicu konflik terbuka, insiatif Kesultanan Tidore mendistribusikan masyarakat adat Tidore untuk mendiami daerah Oba demi kepentingan harmonisasi. Pandangan kesultana Tidore tentang langkah jernih dengan menghubungkan harmonisasi sosial agama itu pernah tercatat dalam sejarah besar pesan moral atas diijinkannya Ottow dan Geissler untuk menyebar ajaran Injil di Papua (Suryo, 2023). Tapi ada pesan bahwa wilayah-wilayah suda memeluk Islam tidak perlu diganggu dan saling menjaga solidaritas dan

menjuggung kearifan. Maka di Papua di kenal dengan filosofi “satu tunggu tiga batu”, agama ade kaka (bersaudara), praktik etika sosial telah membatin dalam kehidupan orang Muslim dan Kristen Melanesia.

Kedua, konstruksi kampung adat di Halmahera, jadi penduduk Tidore yang mendapatkan kebijakan transmigrasi lokal seperti daerah adat pegunungan Desa Gurabunga, Desa Jai, Desa Folarora dan Desa Tambula. Sedangkan etnis Tidore ke daerah Halmahera (Oba Utara) dalam konteks kebijakan transmigrasi mengacu pada rencana pemerintah pusat ke daerah yang minim penduduk. Fokus transmigrasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek kewilayahan, seperti potensi sumber daya, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. *Ketiga*, pasca transisi kepemimpinan dari Soekarno ke Presiden Soeharto, rencana program transmigrasi besar-besaran penduduk di pulau Jawa ke luar Jawa. *Empat*, Halmahera sebagai gerbang strategis untuk konsolidasi perebutan Irian barat. Halmahera jadi pusat konsolidasi kekuatan politik, salah satu langka adalah menghidupkan relasi entitas orang Maluku dan Papua melalui Raja Ampat, Fakfak, Kaiman dan Tarof (Sorong Selatan). Kebijakan transmigrasi lokal di Halmahera bentuk dari menghidupkan kembali imajinasi keindonesiaan orang Papua dalam gerakan anti-kolonialisme. Ralbert Memmi dalam *The Colonizer and the Colonized* menegaskan bahwa kolonialisme tidak sekedar merampas tanah, tetapi menghancurkan citra diri bangsa terjajah. Dalam kata-kata Pramodya tidak hanya miskin harta, tapi juga miskin imajinasi untuk merdeka (Latif, 2025).

Kebijakan transmigrasi Kesultanan Tidore mengajari kita pada satu kemampuan sejarah atas kekuatan kesultanan maritime, dan memiliki wilayah aliansi hingga ke dataran Papua. Tidore sebelum integrasi Papua ke NKRI Tidore benar-benar memainkan peran penting dalam ingatan sejarah orang Papua, terutama relasi Papua pesisir dan otoritas politik kesultanan baik itu raja Sangaji, Jojau, Kapitan Laud dan Marin. Terbaca bahwa paradigma kepemimpinan Sultan Zainal Abidin Syah (Kesultanan Tidore) mengandalkan kecerdasan kenektifitas, inkulsif-kolaborasi dan etos kerja serta ketangguhan masyarakat (Handoko & Mansyur, 2018). Sadri (1994) dalam tulisannya mengatakan nalar politik Sultan Zinal Abidin Syah tidak berada pada level praktis material, tapi ada pada loncatan besar atas ruang sosial baru yang diusung dengan prinsip rasionalitas dan moral sosial (kebijakan tersebut terpotret pada gambar I). Zainal Abidin Syah sosok seorang pemimpin dengan intelektual yang memadai, pandangan yang jauh mewakili kecerdasan kewilayaan dan teritorial holistik. Relasi yang dibangun oleh Sultan Zainal Abidin adalah dimensi adat dan spritualitas. Ada *doxa* yang kuat sehingga nalar kesultanan menemukan ide besar tentang kekuatan multidimensi, sehingga menjaring kekuatan kekerabatan untuk menyambungkan Indonesia baru dari Sabang sampai Merauke. Wawasan politik kewilayaan Kesultana Tidore melampui dan paripurna. Gambaran di atas merupakan konsep transmigrasi yang dilaporkan oleh (Fearnside, 1997) dalam laporan riset bahwa transmigrasi militer khusus pada daerah-daerah perbatasan seperti Irian Jaya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, selain alasan ekonomi. Tapi untuk kebijakan transmigrasi kesultana memiliki pesan relasi sejarah, kultural dan tauhid sosial akan menjadi pengikat dan alasan utama dalam balutan intergasi Papua.

Realitas Sosial Baru Orang Tidore di Halmahera

Konteks penelitian ini penulis fokus pada tiga aspek penting dalam kebijakan transmigrasi lokal yakni jaringan sosial, kepercayaan dan norma. Ketiga dimensi secara teoritik bisa mengurai fakta sosial tentang politik kewilayaan dalam konteks transmigrasi yang terjadi di masyarakat desa Ampere.

Marong, Glasi dan Gololi: Jejaring Sosial orang Tidore di Halmahera. Peranan jaringan sosial masyarakat Tidore sebagai instrumen penting dalam proses transmigrasi. Salah satunya upaya Sultan Tidore Zainal Abidin Syah dalam keputusan transmigrasi lokal warga masyarakat adat di Tidore ke darataran Halmahera. Kebijakan transmigrasi berfokus pada pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah kurang penduduk. Upaya strategis tersebut, maka unsur terpentingnya adalah jaringan sosial orang Tidore seperti *Marong/Galasi, Gololi* dan Relasi Tarekat yang dipegang oleh orang Tidore menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan.

N. Bajang menjelaskan tiga model bentuk kerja sama/Gatongroyong (*Marong, Glasi dan Gololi*) orang Tidore dalam hal ini bukan sekedar kebiasaan tetapi sudah menjadi cara hidup untuk saling menopang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada orang mau buka kebun baru dia tidak bekerja sendiri, biasanya dibantu saudaranya, tetangga dan teman mulai dari membersihkan, menanam bahkan pada panenpun masih dibantu. Begitu juga dengan ada orang bangun rumah maka orang kampung datang untuk membantu bekerja dengan memberikan bahan dan sebagainya, hal ini membuat pekerjaan menjadi ringan. Ada juga misalnya acara pernikahan atau ada orang meninggal maka masyarakat datang membantu mempersiapkan acara tersebut, ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun diajarkan oleh orang tua dulu sampai sekarang (W/15/2/2026). Augusto Alexandre (2025) Relasi sosial bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui proses interaksi, keterhubungan, dan ketergantungan yang terus berkembang. Dalam perjalanan sejarah masyarakat, solidaritas kelompok menjadi kekuatan kolektif yang mendorong terbentuknya kekuasaan, perubahan sosial, serta perkembangan peradaban menuju tingkat kebudayaan yang lebih maju.

Marong biasanya dilakukan pada saat buka lahan pertanian baik itu kebun tanaman bulanan dan tahunan seperti cengke, pala dan coklat. Masyarakat Garajou sampai pada tahun 1990-an kegiatan ini sudah mulai berkurang, karena salah satu faktor transisi pekerjaan generasi muda memiliki bekerja sebagai ASN dan Swasta, sedangkan kegiatan gotong royong untuk pembangunan rumah warga dan tempat ibadah, atau fasilitas umum masih dijalankan dengan baik hingga kini. Bayan menjelaskan Kesultanan Tidore mendorong ikatan sosial dalam jaringan sosial kesukukan dan agama. Sultan Tidore membagi tanah setiap untuk masyarakat yg berkebun seperti pembagian tanah sebesar 2-4 hektar bagi generasi pertama di jaman itu. Selain itu juga pembentukan lembaga sosial seperti kelompok arisan (gololi, sone dan ahu malang), perkumpulan spritual pun terbentuk dalam proses ritual tarekat yg dirituskan pada malam Jum'at dengan pimpinan seorang joguru/mursit (W//26/02/2025).

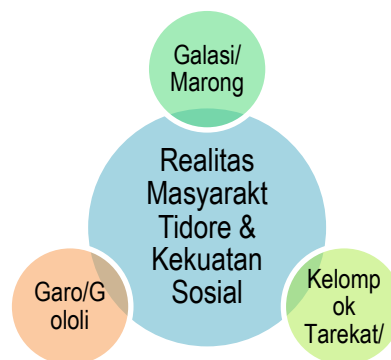
Studi dekumen sejarah dan tutur lisan menunjukkan bahwa transmigrasi yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore berdasarkan kekuatan relasi sosial/jaringan sosial. Dieberapa desa yang terbentuk kelompok dan dimobilisasi berdasarkan hubungan kekerabatan dalam struktur sosial orang Tidore. Misalnya di desa Ampera, Garajou, Oba, Somahode dan Kusu terbentuk dari relasi sosial kampung, contoh kongkrit desa Ampera terbentuk dari Gurabunga Jai, Ladaake yang secara adat kampung adalah wilayah adat Nyili Gamtofkange. Dari hasil pertemuan pihak kesultanan dengan beberapa desa di wilayah Gamtofkange tersebut, maka dipilihlah 67 orang yang ikut kegiatan transmigrasi tersebut dari kampung-kampung diantaranya: Gurabung (7 orang); Jai (19 orang); Lada ake (10 orang); Folarora (5 orang); Tambula (5 orang); Tomadou (15 orang). Kebanyakan dari mereka yang mengikuti program transmigrasi ini belum berkeluarga karena pada saat itu dalam benak masyarakat yang datang ke wilayah Halmahera adalah

wilayah yang penuh dengan mahluk halus (coka, setan, koko, meki, blisi.dll) (Dokumen Profil Sejarah Desa Ampera 2016). Jadi transmigrasi memerlukan anak muda atau mereka yang memiliki tenaga dalam kerja dan bertahan hidup, selain itu juga memiliki idealisme dalam mempertahankan wilayah kesultanan dari gempuran orang pendatang. Latif, (2025) berpendapat bahwa konektifitas kekerabatan dalam kebijakan kerajaan di nusantara tidak selalu soal penaklukan, melainkan merajut jaringan, menguasai bukan selalu monopoli, melainkan untuk menjamin keamanan suatu wilayah.

Mencermati uraian dokumen dan temuan empirik, maka penulis menjelaskan bahwa proses penempatan transmigrasi di wilayah Oba Utara Halmahera pada umumnya berdasarkan pada jaringan sosial yang disebut dengan marga. Sebab perwakilan 7 (tujuh) baik itu desa Gurabunga, Jai, Ladaake, Folarora, Tambula, Goto dan Tomadou adalah dalam struktur sosial kemargaan di Tidore mereka tergabung dalam marga soa Romtoha Tomayou. Jadi rencana transmigrasi lokal Kesultanan Tidore masyarakat dari komunitas yang sama, selain menghindari polarisasi dan polemik di pemukiman baru karena semua perwakilan kampung memiliki hubungan keluarga. Mereka membangun menjangkau relasi sosial dan diplomasi melalui budaya dan politik.

Jaringan sosial seperti yang dijelaskan di atas, menggambarkan bahwa kampung-kampung tersebut bagian dari wilayah (Limau) Gamtufkange yang dalam struktur kesultanan mereka memiliki Gimalaha (pemimpin wilayah marga) tersendiri, secara hirarki memiliki hubungan komando sosial yang kuat. Bayan Hamisi (85) salah satu saksi hidup peserta gelombang ke 2 transmigrasi oleh Sultan Zainal Abidin Syah. Awal mula kami datang itu, langsung di kumpulkan dan pilih pemimpin (Tolamo), tanah kami diserahkan lengkap dengan surat hak milik tanah dari sultan. Hak tanah dengan konsekuensi, barang siapa yang pulang dan tidak berjalan sesuai perjanjian maka dia tidak berhak memiliki tanah. Kelompok petani terbentuk, sistem tarekat dirituskan dan semua Garo Gam (lembagai sosial yang mengurus tentang orang lahir (kelahiran) dan orang meninggal (kematian)). Kami yang hadir di gelombang ke 2 tidak memiliki tanah di dataran rendah, kebanyakan kami sudah dapat tanah di dataran tinggi karena di generasi pertama trans sudah terbagi habis (W/28/2025).

Gambar I. Bentuk Jaringan Sosial dan Kelompok Kerja Sosial



Sumber: Diolah dari Data Lapangan, 2025

Galasi/Marong adalah kelompok kerja sama masyarakat desa Ampera, ini adalah adat masyarakat Tidore hingga kini masih bertahan. Misalnya kerja sama dalam pembongkaran lahan pertanian dan kerja-kerja seperti pembangunan rumah penduduk dan warga. *Garo/Gololi* adalah kelompok sosial yang

bergerakan dalam hajatan kelahiran manusia, menika dan kematian. Jadi di saat siapa saja yang berhajat, semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan berhukum wajib bagi anggota kelompok. Biasanya ada yang kumpul beras, gula, minyak, kelapa dan bahan lain sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari kelompok ini sederhana yaitu kebersamaan dalam meringankan anggota yang memiliki hajat baik itu orang lahir, menika dan meninggal. *Jamah Tarekat* adalah menjaring kekuatan spiritual masyarakat Ampera dengan pemimpinnya adalah joguru/mursyit. Jamah terakat ini bergerak pada level spiritual tetapi juga berdampak pada kerjasama sosial yang kuat, misalnya salah satu anggota jamah tarekat memiliki hajatan maka gerakan sosial itu hadir untuk saling membantu.

Peran dari para tetua adat dan agama, dalam memberikan kepastian perjuangan dan membangun kehidupan pemukiman baru sangat relevan dalam konsep modal sosial. Bagi (Putnam et al., 1993) hubungan modal sosial dalam relasi ekonomi itu terlihat dalam ruang pasar sebab kinerja ekonomi secara keseluruhan jauh lebih baik dalam masyarakat, dibanding kehidupan masyarakat yang tidak terkait dengan kerja sama. Putnam menilai bahwa kerja sama dalam kehidupan ekonomi berpotensi pada perkembangan ekonomi masyarakat baik di level mikro dan makro.

Praktik *Galasi/Marong*, Munara, serta arisan yang berkaitan dengan kelahiran, kehidupan sosial, dan kematian masih dijalankan hingga kini di Desa Ampera. Dalam konteks masyarakat Tidore/Kalaodi, Marong dapat dipahami sebagai pembentukan kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan bersama, sedangkan Galasi menunjuk pada pengaturan waktu kerja bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja kolektif (Teng et al., 2021). Praktik tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bukan sekadar tradisi lama, melainkan mekanisme reproduksi modal sosial masyarakat.

Pada masa kini, bentuk-bentuk kerja sama tersebut mengalami perluasan melalui arisan pendidikan dan arisan bahan bangunan rumah, seperti semen, seng, dan kayu. Arisan dapat dibaca sebagai bentuk *rotating savings and credit association* atau ROSCA, yaitu lembaga keuangan informal yang bertumpu pada kepercayaan, kewajiban timbal balik, dan jaringan sosial anggota (Acquah & Dahal, 2018; Kharisma et al., 2020). Dengan demikian, jaringan sosial yang sebelumnya diwariskan oleh generasi tua tidak hilang, tetapi direproduksi dan ditambahkan ke dalam agenda-agenda baru berdasarkan kesepakatan kelompok.

Orang tua generasi sebelumnya menjalani kehidupan dengan mengandalkan jaringan kerja sama kelompok untuk mempertahankan hidup. Proses identifikasi kelompok kerja sosial di Desa Ampera memperlihatkan adanya kekuatan sosial atau energi sosial yang menjadi penggerak sistem kerja sama masyarakat. Dalam teori modal sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan memungkinkan koordinasi serta tindakan kolektif dalam masyarakat (Coleman, 1988; Putnam, 1995). Modal sosial juga dapat menjadi sumber daya yang menguntungkan individu maupun kelompok karena menyediakan akses pada informasi, dukungan, solidaritas, dan kerja sama sosial (Adler & Kwon, 2002; Woolcock, 1998).

Dalam konteks transmigrasi, perpindahan penduduk tidak semata-mata dapat dipahami sebagai pemindahan permukiman, tetapi juga sebagai proses sosial-ekonomi yang membentuk jaringan baru, distribusi keterampilan, dan pola hubungan antarkelompok. Kajian tentang transmigrasi di Indonesia menunjukkan bahwa program transmigrasi berkaitan dengan pemindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya, pembukaan permukiman pertanian, transfer keterampilan, dan

pembangunan wilayah (Bazzi et al., 2016; Murtisari et al., 2022). Di kawasan transmigrasi, modal sosial dan perubahan kelembagaan berperan dalam memperkuat pembangunan desa; jaringan etnis, agama, dan hubungan sosial dapat memfasilitasi pertukaran informasi serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa (Rozuli et al., 2024).

Imam memimpin ritual *tola gumi* (hukum penguasaan lahan) sebagai pertanda pembukaan lahan berkebun pertama kali. Di saat itu mereka teringat akan pesan Sultan : “*gahi iya, yohu mace iya ge ngon na due ma*” yang berarti “siapa yang membersihkan atau yang mengelolah lahan itu, itu merupakan milik dia”. Setelah ritual *tola gumi* masyarakat membuka lahan untuk berkebun dan membangun pemukiman sebagai tempat tinggal mereka yang penataan ruangnya sama persis dengan desa Ampera saat ini. Tokoh-tokoh agam hadir dalam proses ritual yang dilakukan untuk masyarakat desa Ampera ini juga telah digambarkan oleh (Syam, 2013) mendalami riset tarekat petani dalam pandangan antropologi. Dia menjelaskan bahwa fenomena tarekat “*syattariyah loka*” dikalangan masyarakat petani Indonesia. Jadi tarekat tidak hanya sebagai praktik spiritual, tetapi juga bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat agraris yang menggerakkan energi sosial dengan relasi spiritual.

Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Transmigrasi di Halmahera. Kebijakan kesultanan tentang politik kewilayahan dalam konteks transmigrasi lokal. Pendapat kebanyakan orang bahwa daerah Halmahera memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan dihuni oleh suku-suku asli Halmahera seperti Togutil. Belum lagi ditambah dengan kepercayaan masyarakat tentang banyaknya makhluk non-manusia seperti, swanggi dan setan karena hutan ini tidak dijama oleh manusia. Kebanyakan dari mereka yang mengikuti program transmigrasi ini belum berkeluarga karena pada saat itu dalam benak masyarakat yang datang ke wilayah Halmahera adalah wilayah yang penuh dengan makhluk halus (coka, setan, koko, meki, blisi.dll) (Dokumen Porfil Sejarah Desa Ampera, 2016). Bayan selaku Kepala Dusun Desa Ampera 1 menurut cerita para pendahulunya tentang bagaimana orang-orang diyakinkan dengan cara proses ritual yang dilakukan oleh tetua adat (gosimo). Kelompok transmigrasi menyebar di dataran Oba disiapkan dengan para pemimpin baik itu joguru (guru Agama/Tarekat) dan gosimo (tetua adat) (W/3/3/2026).

Peristiwa keberangkatan masyarakat Gurabunga, Jai/Jaya, Ladaake, dan beberapa desa lain di wilayah adat Gamtufkange pada 19 April 1964 perlu diposisikan sebagai data primer dari naskah sejarah lokal. Dalam naskah tersebut, masyarakat dikumpulkan di rumah Bapak Sobari Joho atau Sowohi Kie Matubu di Desa Gurabunga, kemudian menuju Gamtufkange di rumah Bapak Gimilaha Toduhu, dilanjutkan ke Kraton Kesultanan atau Doro Kolano, sebelum berangkat menggunakan kapal kayu menuju Halmahera/Halaeyora. Secara akademik, peristiwa ini dapat dikaitkan dengan proses transmigrasi lokal masyarakat Tidore ke Halmahera pada periode 1963–1980 (Teng et al, 2021). Kepercayaan masyarakat terhadap Kesultanan sebagai pemberi rasa aman juga dapat dipahami melalui kedudukan Kesultanan Tidore sebagai institusi adat-politik yang memiliki struktur pemerintahan, perangkat Bobato, serta legitimasi adat yang berkaitan dengan Gamtufkange dan Gurabunga (Minu et al., 2022). Selain itu, nilai-nilai lokal seperti Borero Gosimo dan bobeto memperlihatkan bahwa adat Tidore tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai sumber moral, keteraturan, dan perlindungan kolektif masyarakat (Nomay, 2019).

Awal tinggal di Halmahera merupakan satu tantangan yang luar biasa, rasa rindu akan kampung halaman merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, (*eee.....ngofa sedano soninga dolawotu magungih, duka so sira kie se gam tidore, ma sababu toma kie gira-gira, mega la yo sema nage la tohoda*) untuk mengobati rasa rindu tersebut maka sultan hadir di dusun Usdek membawa oleh-oleh (*doyo*) 2 bola kaki dan 2 bola voli tujuannya adalah menghibur masyarakat sehingga betah tinggal di dusun Usdek, selain itu sultan hadir kembali di saat menjelang lebaran idul adha untuk penyerahan sapi kurban dan sekaligus lebaran bersama masyarakat di dusun Usdek. Dusun Usdek sendiri adalah nama yang diberikan oleh sultan yaitu (undang-undang dasar, sosialisme indonesia, demokarasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia), disingkat USDEK (Sumber: Dokumen Profil Desa Ampera, 2016).

Mobilisasi kolektif seperti pola kebijakan transmigrasi lokal kesultanan dalam konteks kepercayaan sangat berhasil. Transmigrasi desa Garo Jou kebanyakan mereka adalah penduduk kampung Kalaodi yang belum berkeluarga karena pada saat itu dalam benak masyarakat yang datang ke wilayah Halmahera adalah wilayah yang penuh dengan setan, koko, meki, iblis. Pada tanggal 19 april 1964 dikumpulkan masyarakat Kalaodi yang berjumlah 32 orang tersebut bersama *jou* sultan Jainal Abidin Syah beserta Bobato Kesultanan Tidore untuk melakukan perjalanan ke daratan Halmahera, sebelum melakukan perjalanan ke wilayah yang pada saat itu dianggap penuh dengan *jin ini simo nau yati* sebagai *sowohi kalaodi* pada saat itu bepesan kepada masyarakatnya: "*oti simore ma belo ge lupa ma longga ifa...wange rimoi malofo...ora rimoi malofo...se tahun rimoi malofo toma gai ia...bolito si ona gosimo yo siguci ilham te fongare...to borero te jongon no haro ua gee...kie Tidore yo lulu gate langasa si fongare ni oli ne yo tola...* Artinya: (mengandung makna kekeluargaan yang sangat kuat, ikatan kekeluargaan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dimanapun kita berada kita tetap masyarakat Kalaodi yang akan tetap memegang teguh *madofolo dzikrullah madarifa papa se tete*, makna kata ini tersirat dalam lagu "kalaodi malige" "*siokona ngofa se dano ngone na guci ge ramoi bato lupa ifa ruwahan ge maku haro*" (Sumber: dokumen sejarah singgkat desa Garajoi, 2019).

Ada ruang kepercayaan ditumbukan dengan narasi-narasi lokal baik itu pesan leluhur dan seni yang menggairahkan dan meneguhkan hati para transmigrasi. Inti dari warisannya sederhana bahwa kejayaan sejati lahir dari kolaborasi bukan dominasi; dari kebijaksanaan mengelola keragaman. Kesultanan Tidore percaya dengan kehadiran orang Tidore di Halmahera akan menjadi jembatan dalam kesejahteraan hidup. Studi dokumen menguraikan bahwa Sultan Tidore meyakinkan peserta transmigrasi di dataran Halmahera rumah besar kesultana Tidore. Tidak ada masalah anak cucu yang tinggal di wilaha Halmahera akan dilindungi oleh alam dan leluhur, oleh karena itu setelah di pagi harinya Bapak Husaen Mahifa (Perwakilan Joguru & Gosimo Tomayou), Gimlaha Gamtofkange, dan Bapak Iman Ibrahim (Imam Gamtofkange) memimpin ritual tola gumi sebagai pertanda pembukaan lahan berkebun pertama kali. Di saat itu mereka teringat akan pesan Sultan: "*gahi iya, yohu mace iya ge ngon na due ma*" yang berarti "*siapa yang membersihkan atau yang mengelolah lahan itu, itu merupakan milik dia*" (Sumber: Dokumen Sejarah Kewilayaan Dinas Pariwisata Kota Tidore, 2019). Malthus, (2023) seorang ahli kependudukan menjelaskan bahwa ledakan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi ancaman serius terhadap persediaan pangan. Pandangan Malthus atas satu tesis yang kuat bahwa kekurangan pangan akan menciptakan ruang pertarungan dan perburuan manusia, jadi penyebaran penduduk sangat dipercaya sembari proses pengendalian penduduk.

Kepercayaan yang tinggi bisa dijadikan sebagai landasan untuk merubah kehidupan, walau kehidupan itu berada di daerah yang masih baru dan penuh dengan tantangan. Semua upaya dilakukan untuk menghidupkan semangat hidup, maka masyarakat desa Ampera tetap jalan dengan bercocok tanama (berkebun), tapi juga membangun satu optimisme dengan berolahraga. Pandangan Penulis ini Relvan dengan apa yang jadi dasar (Fukuyama, 2000). Fukuyama menyebutkan bahwa kepercayaan adalah sebuah penangkal esensial terhadap laju peningkatan budaya, yang jika tidak diawasi akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan. Lanjut Fukuyama menegaskan bahwa kepercayaan seharusnya di ingat dalam dirinya sendiri bukan merupakan kebijakan moral, tetapi leboh merupakan efek samping dari kebijakan. Kepercayaan munculketika masyarkat saling berbagi norma-norma kejujuran dan ketersediaan untuk saling menolong dan oleh karenanya mampu bekerja sama satu dengan lain.

Berdasarkan cerita temuan penelitian di atas dengan pendapat (Fukuyama, 2000) bahwa kepercayaan masyarakat akan menguatkan mereka dalam perjuangan apapun, oleh karena itu salah satu instumen dengan cara “ritual” tola gumi (potong tali) masyarakat membuka lahan untuk berkebun dan membangun pemukiman sebagai tempat tinggal mereka yang penataan ruangnya sama persis dengan desa Ampera saat ini. Selain sebagai satu studi budaya masyarakat Ampera juga memiliki efek secara ekonomi dalam kehidupan budaya. Misalnya dalam cerita kepercayaan dan praktik ekonomi masyarakat dalam pertanian bisa dibilang masyarakat desa Ampera menggunakan ilmu falak dalam menentukan hari baik proses bercocok tanam di lahan pertanian yang mereka miliki.

Reproduksi Norma Sosial Masyarakat Transmigrasi di Oba Halmahera. Norma-norma ini biasanya melembaga atau terinstitusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya, dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Penulis mengidentifikasi beberapa kesepakatan sosial secara lisan yang kemudian itu bernetamorfosa menjadi norma sosial masyarakat transmigrasi.

Tabel I. Norma-Norma Sosial Orang Tidore di Halmahera

Norma Sosial	Uraian Norma	Konsekuensi Sosial
Kepemilikan tanah (ahu ma-lang)	1 hektar kepemilikan atas tanah di berikan kesultanan, tapi jika kembali ke Tidore dan keluar dari barisan transmigrasi, maka orang bersangkutan dan keturunan tidak boleh memiliki tanah pemberian Sultana. Jika ketahuan dia menyimpang, maka hasil dari tanah tersebut “tidak” selamat dunia dan akhirat.	Tidak memiliki hak atas tanah, maka tanah tersebut dikebalikan ke pihak kesultanan.
Galasi, Babari dan Marong (Lembaga Sosial)	Norma kerjasama yang tidak tertulis tapi telah menjadi kesepatan bersama dalam kelompok kerja bersama (baik itu berkebun atau pembangunan rumah) yang disebut dalam bahasa Tidore adalah <i>glasi</i> dan <i>marong</i> . Keloomok kerja ini dipandu dengan jam pasir (sehingga setiap anggota yang terlibat mendapat keadilan dalam	Barang siapa yang lalai maka sangsi sosial akan dijalankan, sangsi sosial akan dikenakan kepada anggota yang melanggar.

	kerja.	
Garogololi	<i>Garogololi</i> adalah kelompok sosial yang bergerak dalam hajatan kelahiran manusia, menikah dan kematian. Jadi di saat siapa saja yang berhajat, semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan berhukum wajib bagi anggota kelompok. Biasanya ada yang kumpul beras, gula, minyak, kelapa dan bahan lainnya sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.	Pandangan sosial bahwa <i>Garogololi</i> dapat meringankan seseorang jika memiliki hajat, baik itu hajat kedukaan (meninggal), hidup dan pernikahan. Jika tidak mengikuti <i>Garogololi</i> suda dipastikan akan mendapatkan sangsi. hal ini tidak akan berlaku bagi dia yang memiliki hajatan tersebut.
Jamah tarekat/Ritual Tarekat	Jamah Tarekat adalah menjangir kekuatan spiritual masyarakat Ampera dengan pemimpinnya adalah <i>joguru/mursyit</i> . Jamah terakat ini bergerak pada leve speritual, tatapi juga berdampak pada kerjasama sosial yang kuat, misalnya salah satu anggota jamah tarekat memiliki hajatan maka gerakan sosial itu hadir untuk saling membatu. Jadi jamah tarekat memiliki dalam tanda baik itu dalam ranah <i>teosentrisme</i> dan <i>antroposentris</i> .	Tidak ada konsekuensi karena bersifat spiritualitas antara manusia dengan pencipta.

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Galasi/Marong adalah kelompok kerjasama masyarakat desa Ampera, ini adalah adat masyarakat Tidore hingga kini masi bertahan. Misalnya kerjasama dalam pembongkaran lahan pertanian dan kerja-kerja seperti pembangunan rumah penduduk dan warga. *Garogololi* adalah kelompok sosial yang bergerak dalam hajatan kelahiran manusia, menika dan kematian. Jadi di saat siapa saja yang berhajat, semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan berhukum wajib bagi anggota kelompok, biasanya ada yang kumpul beras, gula, minya, kelapa dan bahan lain sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari kelompok ini sederhana yaitu kebersamaan dalam meringankan anggota yang memiliki hajat baik itu orang lahir, menika dan meninggal. Menurut Muli bahwa “Sultan Zainal Abdin Syah menyebutkan bahwa selain pembagian tanah setiap orang mendapatkan 1 hektar di saat itu. Tapi barang siapa yang rajin berkebun (*rado*) dilahan baru (*gura sung*) maka itu jadi hak miliknya. Jika ditemukan ada peserta trans pulang kembali ke Tidore dan tidak kembali ke Halmahera, maka tanah yang diberikan bukan jadi hak milik mereka (W/2/3/2025).

Pengalaman penulis pernah menyaksikan kasus penggunaan fasilitas gedung sekolah dari keluarga besar Tambula. Saat itu keluarga besar Tambula yang merupakan peserta transmigrasi gelombang pertama di dusun Ampera, orang tuan mereka pulang kembali ke Tidore dan tidak kembali lagi ke desa Ampera. Beberapa puluhan tahun kemudian anak cucuk mereka kembali dan menggugat tanah miliki orang tua mereka di pengadilan. Ikut tegugat Pemerintah Desa Amper dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sebab ada yang dulu tanah orang tua mereka di bangun gedung sekolah. Karena beralaskan pada kesepakatan sosial pada saat itu (norma kepemilikan tanah) yang menjadi kesepakatan lisan antara Sultan Zainal Abdin Syah dan masyarakat trans Desa Ampera. Maka secara hukum keluarga Tambulan tidak punya hak untuk memiliki tanah miliki orang tuanya kebal, jadi konsep kepemilikan tanah (*ahu ma lang*) tetap berlaku untuk keluarga besar Tambula. Fukuyama (2000) secara sederhana serangkaikan nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalannya kesepakatan bersama diantara mereka. Jika para anggota kelompok itu

mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai.

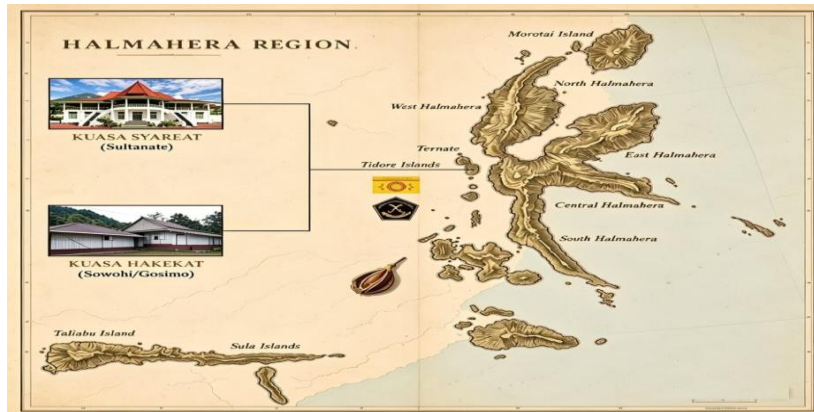
Makna modal sosial sama saja dengan modal lainnya karena sifatnya sama produktif. Namun jika modal sosial tersebut dilihat sebagai produk, maka itu merupakan suatu relasi antara manusia satu dengan yang lainnya, dan menjadi relasi yang intim serta konsisten. Modal sosial yang mengarah kepada bentuk jaringan, dan norma serta kepercayaan dari suatu masyarakat, maka berpotensi pada produktivitas bagi masyarakat itu sendiri. Pengamatan penulis bahwa hingga saat ini norma sosial masi menjadi ujung tombak dalam proses perubahan sosial masyarakat desa Ampera. Kesadaran kolektifitas telah menjadikan satu kekuatan sosial baru (*social invention*) yang medayagunakan sumber-sumber energi sosial yang baru (motivasi, komitmen, wewenang, modal sosial, gerakan sosial, organisasi, aturan dan kebijakan) yang telah mendorong satu perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ilham Ali menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh orang tua-tua dahulu dengan Sultan Tidore di daerah ini, prinsipnya kami sebagai generasi penerus tetap menjalankan kebiasaan baik yang suda dikerjakan, salah satu pesan moral “*Jaga Loa Se Banari*”, artinya: *tetap ada dalam tindakan yang benar dan luar*. Kami selalu jaga atau bagaimana yang dipesankan oleh pihak kesultanan atau yang mulia Zainal Abidin Syah (W/2/2025). Latif, (2025) kekuatan sejati terletak pada kemampuan menyatukan gelombang samuda dengan warisan pustaka. Peneliti melihat bahwa Kesultanan Tidore mengerjakan itu dengan meletakkan tatatan sosial dan mengkonstruksi norma-norma sosial masyarakat Tidore di Halmahera.

Norma sosial jadi bagian dari nilai-nilai falsafah “*Toam Loa Se Banari*” jelas ditegakkan, tafsir itu lebih kongkrit dalam aturan “*kie se kolano*” terdiri dari dua azas yang dijalankan oleh kuasa Kesultanan Tidore. Eksplorasi kembali nilai, asas dan konsep ketatanegaraan Kesultanan Tidore yang dalam dokumen dibukukan menjadi satu konstitusi yang utuh pada 1868-1967 M. Seperti azas-azas meliputi: 1) Azas pemerintahan, diantaranya adalah; *jaga loa sebanari* (bertindak jujur adil dan benar), *kie sekolano* (integralistik antara pemimpin dan masyarakat), *adat se nakodi* (kemanusiaan yang beradab), *atur se aturan* (pelimpahan wewenang), *fara se filang* (pengelolaan dan pembagian hasil sumber daya alam) dan *syah se fakati* (musyawarah mufakat). 2) Azas relasi sosial; azas *oli se nyemo-nyemo budi se bahasa* (tata krama dan etika berkomunikasi dalam sosial), *nyaku se rasai* (konsisten, amanah dan ideologis), *cing se cingari* (demokratis dan rendah hati), *mae se kolofino to tede suba te jou madubo* (merasa malu jika berbuat salah dan rendah hati)” (Wahid, 2019).

Penulis perlu memberi satu silogisme sederhana bahwa percaya pada kebijakan sultan adalah konsep yang sangat penting dalam konteks pemerintahan monarki, walaupun Negara Indonesia telah berdiri sebagai Negara Republik. Tapi sejauh ini pengaruh modal sosial dalam konteks kepercayaan yakni: *Pertama*, Kearifan Kepemimpinan: Sultan Zianal Abdin Syah bisa menggerakkan modal sosial dalam hal ini energi sosial dalam kepemimpinan, dia mengajarkan segalanya dalam memberikan keputusan, otimisme yang tinggi pun tumbuh dan patut pada keptusan politik yang dijalankan Sulatan Zainal Abdin Syah. *Kedua*: Adat, Loyalitas dan Milintasi Bela Rakyat: Keterkaitan sosial antara kesadaran untuk masa depan dan mengabdikan pada keputusan pemimpin adalah salah satu kunci kesuksesan masyarakat transmigrasi desa Ampera hingga hari ini.

Beberapa poin penting dalam mempercayai pada kebijakan sultan diantaranya: 1) Kestabilan politik; Percaya pada kebijakan sultan dapat menjaga kestabilan politik dan mencegah konflik. 2) Kepatuhan; Percaya pada kebijakan sultan dapat meningkatkan kepatuhan rakyat terhadap pemerintahan. 3) Keharmonisan; Percaya pada kebijakan sultan dapat menjaga keharmonisan dalam masyarakat. 4) Kemakmuran; Percaya pada kebijakan sultan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Gambar III. Peta Halmahera dan Kuasa Kesultanan Tidore



Sumber: Dokumen Penelitian, 2025

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Sultan Tidore memiliki peran penting dalam mengendalikan politik kewilayahaan di Halmahera. Dalam Kebijakan transmigrasi lokal, pandang peneliti bahwa politik kewilayaa begitu penting dan strategi baik dalam bentuk tatanan imajinasi agama, ekonomi, pertahanan, keamanan dan masalah nalar kolektif atas keindonesiaan. Program trasnmigarsi lokal ini memiliki ciri khas tersendiri karena tidak hanya dilakukan oleh institusi formal negara melainkan juga aktor/elit lokal seperti Sultan. Selain itu transmigrasi yang dilakukan kesultanan dengan nalar politik yang berpihak kepada kepentingan lokal dan kepentingan nasional, dimana peran Sultan Tidore dalam memfasilitasi perpindahan penduduk dari wilayah pusat (Tidore) ke daerah-daerah di Halmahera menunjukkan bagaimana institusi tradisonal (Kesultanan) dapat memainkan peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah, terutama dalam konteks daerah kepulauan dan mampu menancapkan relasi kolektifitas atas keindonesiaan atau yang distilahkan peneliti adalah ingatan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Acquah, J. K., & Dahal, R. (2018). Rosca s as lenders of last resort after financial crises: Lessons from indonesia. *Journal of International Development*, 30(7), 1223-1239. <https://doi.org/10.1002/jid.3366>
- Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. *Academy of management review*, 27(1), 17-40. <https://doi.org/10.5465/amr.2002.5922314>
- Augusto Alexandre, H. (2025). A phenomenological approach to Ibn Khaldun's concept of group feeling. *Thesis Eleven*, 187(1), 128-144. <https://doi.org/10.1177/07255136241308892>
- Basuki, N., Suhardi, & Mahmud, H. (2025). Strategi adaptasi petani transmigran di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*, 2(2), 399-407. <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i2.33513>

- Bazzi, S., Gaduh, A., Rothenberg, A. D., & Wong, M. (2016). Skill transferability, migration, and development: Evidence from population resettlement in Indonesia. *American Economic Review*, 106(9), 2658-2698. <https://doi.org/10.1257/aer.20141781>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2, Article 14. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Fatgehipon, A. H., & Utomo, S. P. (2020). Sultan Zainal Abidin Syah: From the Kingdom of Tidore to the Republic of Indonesia. *TAWARIKH: Journal of Historical Studies*, 12(1), 49-92. <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v12i1.1370>
- Fearnside, P. M. (1997). Transmigration in Indonesia: Lessons from its environmental and social impacts. *Environmental management*, 21(4), 553-570.
- Fukuyama, F. (2000). *Social capital and civil society* (No. 00/74). Washington, DC: International Monetary Fund.
- Handoko, W., & Mansyur, S. (2018). Kesultanan Tidore: bukti arkeologi sebagai pusat kekuasaan Islam dan pengaruhnya di wilayah Periferi. *Berkala Arkeologi Vol. 38 No. 1, Mei 2018*, 38(1), 17-38.
- Kharisma, B., Remi, S. S., Hadiyanto, F., & Dwi Saputra, A. (2020). The economics of rotating savings and credit associations (ROSCAs) and poverty in Indonesia. *Jurnal Economia*, 16(1), 100-111. <https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.30308>
- Latif, Y. (2025). Building the Soul of the Indonesian Nation: Mohammad Hatta on Religion, the State Foundation, and Character Building. *Studia Islamika*, 32(2), 241-278. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i2.45220>
- Leitner, U. (2024). Triangulating written and oral ego-documents: Autobiographical sources of diocesan pre-seminary pupils, challenges and opportunities. *History of Education*, 53(1), 157-173. <https://doi.org/10.1080/0046760X.2023.2291560>
- Manay, H. (2016). Proyek demografi dalam bayang-bayang disintegrasi nasional: studi tentang transmigrasi di gorontalo, 1950-1960. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 93-106. <https://doi.org/10.14710/jscl.v1i2.12766>
- Malthus, T. (2023). An essay on the principle of population. In *British Politics and the Environment in the Long Nineteenth Century* (pp. 77-84). Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Minu, I. W., Rahmat, R., & Taher, M. R. H. (2022). Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore Perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah di Kota Tidore Kepulauan: Tidore Sultanal Government System al-Siyāsah al-Syar'iyah Perspective in Tidore Island City. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 81-99. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.524>
- Muksin, I., Widianingsih, I., Gunawan, B., & Sugandi, Y. S. (2022). Policy on free land provision for the transmigration development in Payahe Transmigration Area, Tidore City, North Maluku Province,

Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(1), 1–13.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i1.38845>

Murtisari, A., Irham, I., Mulyo, J. H., & Waluyati, L. R. (2022). The Effects of the Transmigration Programme on Poverty Reduction in Indonesia's Gorontalo Province: A Multidimensional Approach. *Economies*, 10(11), 267. <https://doi.org/10.3390/economies10110267>

Nomay, U. (2019). Tuhan, Manusia Dan Alam Dalam (Borero Gosimo) Amanat Datuk Moyang Tidore. *Al-Qalam*, 25(1), 15-32. <https://doi.org/10.31969/alq.v25i1.694>

Nurlinah, N., & Haryanto, H. (2024). Transmigration village development: The state and community organizations in rural Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6, 1441393. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1441393>

Olmos-Vega, F. M., Stalmeijer, R. E., Varpio, L., & Kahlke, R. (2023). A practical guide to reflexivity in qualitative research: AMEE Guide No. 149. *Medical Teacher*, 45(3), 241–251. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2057287>

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>

Putnam, R. D. (2015). Bowling alone: America's declining social capital. In *The city reader* (pp. 188-196). Routledge. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>

Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7>

Rais, M. (2010). Wajah Islam di Bandar Jalur Sutera: Kajian sejarah sosial pada Kesultanan Tidore-Maluku Utara. *Al-Qalam*, 16(2), 191-198. <https://doi.org/10.31969/alq.v16i2.485>

Rozuli, A. I., Afala, L. O. M., Haboddin, M., & Chawa, A. F. (2024). Social Capital, Institutional Change, and Rural Development in Transmigration Area, West Muna Regency, Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 29(2), 1-34. <https://doi.org/10.7454/MJS.v29i2.13578>

Teng, I. S., Nugroho, A. M., & Kusdiwanggo, S. (2021). Pengaruh Petuah bobeto Terhadap Kearifan Setempat Kampung Kalaodi, Kota Tidore Kepulauan. *RUAS*, 19(2), 40–50. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2021.019.02.4>

Sadri, A. (1994). *Max Weber's sociology of intellectuals*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195093988.001.0001>

Sukmana, O., Machmud, M., Basri, L., Khoirurrosyidin, K., Sari, A. F., Jumui, J., Saputro, D., Remtulla, A. N., Walikrom, A. A. R., Arusani, A., & Damanik, F. H. S. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Konseptual dan Praktis*. Star Digital Publishing.

Suryo, F. A. (2023). Irian Barat di mata Sultan Zainal Abidin Syah: Dari Konferensi Malino hingga Operasi Trikora. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 31–36. <https://doi.org/10.31764/historis.v8i1.15259>

Syam, H. N. (2013). *Tarekat Petani; Fenomena Tarekat Syattariyah Lokal*. LKIS PELANGI AKSARA.

- Swasano, S. E., & Singarimbun, M. (1985). Sepuluh winduh transmigrasi di Indonesia, 1905-1985.
- Wahid, B., & Ula, S. N. N. (2019). Suku Tobaru: Dinamika Identitas dan Tradisi Perkawinan di Desa Kusu Halmahera. *Jurnal GRADUAL: Governance Administration and Public Service*, 8(2), 13-25.
- Wahid, B., Ishomuddin, I., Wahyudi, W., & Kartono, R. (2021). Power Politics Contestation in Symbolic Relations of Tidore Local Leader Election. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 305-313.
- Yuminarti, U. (2017). Kebijakan transmigrasi dalam kerangka otonomi khusus di Papua: Masalah dan harapan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 13–24. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.215>
- Zerilli, L. M. (2026). Radical Imagination and Freedom-Centered Feminist Historiography. *Theory, Culture & Society*, 02632764261440767. <https://doi.org/10.1177/02632764261440>

Dokumen

Dokumen sejarah singkat desa Garajoi, 2019

Dokumen sinopsis sejarah Inkat Desa Garo Jou 2019

PROFIL PENULIS

Bustamin Wahid adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Muhammadiyah Sorong. S1 Sejarah di UNG, S2 administrasi Negara Konsentrasi Pengembangan Masyarakat di UMJ dan Doktor Sosiologi di UMM Malang dengan keahlian Riset Sosiologi Politik-Kekuasaan, Sosiologi Melanesia, Politik Multispesies, Ekoteologi dan Kecerdasaan tradisional/Pendidikan adat. Kesibukan lain sebagai penelitian senior di Pusat Studi Melanesia (PSM) Indonesia, lembaga yang konsen tentang riset dan pengabdian untuk masyarakat Melanesia dan kelompok marjinal di Sorong Papua Barat Daya. Selain itu, saat ini penulis berkolaborasi riset dengan antropolog Prof. Anna L. Tsing dari Santa Cruz University, California dan Hatib A. Kadir, Ph.D dari *The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)*.